

Analysis of the Implementation of Global Reporting Initiative (GRI) 400 Disclosures in Sustainability Reports in the Healthcare Sector on the Indonesia Stock Exchange in 2024

Analisis Penerapan Pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI) 400 dalam Sustainability Report pada Sektor Healthcare di Bursa Efek Indonesia Tahun 2024

Zul Azmi¹, Emi Vita Liani^{*2}, Santika³, Sri Cahyani⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau

*Corresponding author's e-mail: emivitalia@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Global Reporting Initiative (GRI) 400 disclosures in Sustainability Reports in Healthcare sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2024. The research method used is a qualitative descriptive approach with technical content analysis of the sustainability reports of sample companies. The sample determination was carried out using a purposive sampling method based on the availability of sustainability reports and the application of GRI standards, the research instrument using a GRI 4 indicator checklist that covers economic, environmental, and social dimensions. The results show that the level of disclosure of Healthcare aspects is still relatively suboptimal. The recapitulation of indicators shows that 66.03% of indicators are not disclosed, while full disclosure only reaches 30.14% and partial disclosure 3.83%, this indicates that sustainability practices in the healthcare sector are still selective and tend to focus on administrative aspects that do not fully reflect the completeness.

Keywords: Sustainability Report, GRI 400, Healthcare Sector.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI) 400 dalam Sustainability Report pada perusahaan sektor Healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknis analisis isi (content analysis) terhadap laporan keberlanjutan perusahaan sampel. Penentuan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan ketersediaan sustainability report dan penerapan standar GRI, instrumen penelitian menggunakan daftar periksa indikator GRI 4 yang mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hasil menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan aspek Healthcare masih tergolong belum optimal. Rekapitulasi indikator menunjukkan bahwa sebesar 66,03% indikator tidak diungkapkan, sementara pengungkapan penuh hanya mencapai 30,14% dan pengungkapan parsial 3,83%, ini menunjukkan bahwa praktik keberlanjutan sektor healthcare masih bersifat selektif dan cenderung berfokus pada aspek administratif belum sepenuhnya mencerminkan secara lengkap.

Kata Kunci: Laporan keberlanjutan, GRI 400, Sektor Kesehatan.

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan menjadi isu yang semakin mendapat perhatian dari masyarakat nasional hingga internasional. Konflik serta ketidakpastian dalam aspek geoekonomi telah menciptakan berbagai risiko global, menurut laporan risiko global 2023. Jika masalah pencemaran lingkungan tidak diperhatikan secara serius, maka

akan menimbulkan kerusakan lingkungan serta dampak negatif terhadap masyarakat. Masyarakat kini semakin menyadari pentingnya menjaga lingkungan hidup dan menjalani gaya hidup yang berkelanjutan. Saat ini, setiap kegiatan dilakukan harus lebih efisien dan ramah lingkungan. Kegiatan tersebut juga harus mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi industri. Industri harus mampu mengelola keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Perusahaan didorong untuk memaksimalkan kegiatan operasional agar dapat meningkatkan profitabilitas mereka, karena sektor industri di Indonesia berkembang dengan cepat. Perusahaan akan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar mungkin (Imani et al., 2023).

Sustainability Reporting sendiri berkaitan erat dengan konsep *Triple Bottom Line* yang pertama kali diperkenalkan oleh (Elkington, 1998). Konsep ini menekankan bahwa perusahaan yang ingin berkembang secara berkelanjutan tidak hanya fokus pada peningkatan keuntungan manusia, termasuk karyawan, investor, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, *Sustainability Reporting* mencakup 3 aspek kinerja perusahaan yaitu aspek ekonomi, lingkungan dan sosial (Ayu et al., 2024). Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan sekelompok standar yang saling terhubung. Standar ini dirancang khusus agar dapat digunakan bersama-sama, sehingga membantu laporan keberlanjutan yang sesuai dengan prinsip pelaporan dan fokus pada isu-isu yang penting. Dengan menerapkan standar GRI, laporan yang dibuat menunjukkan bahwa isu-isu penting organisasi, dampak yang terkait, serta cara mengelola dampak tersebut telah dipertimbangkan secara komprehensif dan seimbang (Muhammad, 2022)

Isu pengelolaan limbah medis menjadi masalah penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan operasional sektor kesehatan di Indonesia. Limbah medis termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak diolah sesuai aturan yang berlaku. Di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, terjadi pembuangan limbah medis secara sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemisahan dan pengelolaan limbah ditingkat fasilitas kesehatan masih lemah. Limbah medis seperti jarum suntik, infusan, dan kemasan berbahaya ditemukan tercampur dengan sampah rumah tangga. Limbah ini, seharusnya dikemas dengan kantong berwarna kuning dan simbol B3, tetapi justru dibungkus plastik hitam seperti sampah biasa. Mengenai hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang memberi sanksi administratif kepada kedua rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Hermina. Kedua rumah sakit diduga tidak mengelola limbah sesuai ketentuan. Mereka diminta memperbaiki sistem pengelolaan limbah, termasuk pemisahan, pengemasan, dan kerja sama dengan pihak pengelola limbah yang berizin. Selain itu, mereka juga wajib melakukan penanggulangan darurat limbah B3 yang telah mencemari lingkungan (VOI, 06 Mei 2025).

Pembuangan limbah medis secara sembarangan menunjukkan tantangan besar dalam menerapkan prinsip keberlanjutan di sektor kesehatan, terutama dalam aspek lingkungan dan tata kelola. Dalam hal pelaporan keberlanjutan, standar *Global*

Reporting Initiative (GRI) khususnya GRI 400 yang menangani aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan terkait karyawan dan masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan ketertiban informasi dan praktik keberlanjutan yang bertanggung jawab. Kurangnya pengungkapan informasi tentang pengelolaan limbah medis menunjukkan kelemahan dalam penerapan prinsip GRI 400. Berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan serius dalam praktik pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya terkait kepatuhan terhadap standar lingkungan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan pengungkapan standar *Global Reporting Initiative (GRI)* seri 400 dalam *sustainability report* pada sektor *Healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai upaya untuk menilai transparansi, akuntabilitas dan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan dampak sosial dan lingkungan.

Laporan keberlanjutan merupakan laporan yang berisi informasi mengenai kinerja perusahaan yang bersifat non-keuangan. Laporan ini menekankan pada penyampaian informasi terkait kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan (Kurniawan, 2017). Menurut Daromes et al (2023), laporan keberlanjutan merupakan bentuk pengukuran dan penyampaian informasi yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Laporan ini dipandang sebagai upaya perusahaan dalam menyampaikan aktivitas yang berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain itu laporan keberlanjutan juga membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan, mengukur kinerja, serta menjadi alat komunikasi informasi terkait operasi keberlanjutan yang telah dilakukan (Kuswanto, 2019). Prinsip yang berkaitan dengan konten laporan meliputi keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder inclusiveness*), konteks keberlanjutan (*sustainability context*), materialitas (*materiality*), dan kelengkapan (*completeness*) (Limarwati et al., 2024).

GRI-4 merupakan panduan yang dibuat oleh organisasi untuk melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai laporan keberlanjutan perusahaan terkait dampak lingkungan, yang memberikan manfaat bagi perusahaan dan pemangku kepentingan, digunakan sebagai gambaran untuk kinerja masa depan demi mencapai keberlanjutan. Konsep ini sangat penting dalam memahami sebagaimana perubahan pendapatan mempengaruhi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. GRI dibentuk oleh organisasi nirlaba berbasis di Amerika Serikat yaitu, *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)* dan *Tellus Institute*, dengan dukungan dari *United Nations Environment Programme (UNEP)* pada tahun 1997. GRI adalah organisasi multi-stakeholder berbasis jaringan. Sekretariat pusat kantor di Amsterdam, Belanda yang bertindak sebagai penghubung untuk mengkoordinasikan kegiatan banyak mitra jaringan GRI (GRI-G4 2016) (Mysaka & Derun, 2022).

Standar GRI 401: Kepegawaian. Standar ini berfokus pada pengungkapan informasi terkait profil dan dinamika kepegawaian dalam organisasi, didalamnya terdapat jumlah total karyawan dan distribusinya berdasarkan jenis kelamin, jabatan, lokasi atau kontrak kerja. Pengungkapan ini juga dijelaskan perubahan kepegawaian selama periode pelaporan, seperti karyawan baru yang keluar atau diberhentikan. Struktur kontrak kerja dan distribusi karyawan berdasarkan pendidikan atau

kualifikasi. Informasi ini bertujuan untuk menunjukkan skala tenaga kerja dan bagaimana organisasi mengelola SDM (Apriliyani et al., 2019).

Standar GRI 402: Hubungan tenaga kerja & manajemen. Standar ini melihat bagaimana organisasi membangun hubungan baik dengan tenaga kerja. Termasuk mekanisme komunikasi antara manajemen dan karyawan, keberadaan serta peran serikat pekerja dan persentase karyawan yang masuk dalam perjanjian kerja kolektif. Selain itu ada upaya organisasi untuk mendengarkan masukan karyawan, tujuannya untuk menunjukkan komitmen menghormati hak tenaga kerja untuk menyampaikan pendapat.

Standar GRI 403: kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai standar yang diperbarui tahun 2018, ini mengungkapkan manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Didalamnya terdapat kebijakan dan sistem yang diterapkan, jumlah serta jenis insiden kerja seperti cedera, penyakit akibat kerja, atau kematian. Area dengan risiko yang tinggi dan langkah mitigasi juga diungkapkan, termasuk cara membantu pekerja yang mengalami cedera untuk kembali kerja (Rakhmawati et al., 2024).

Standar GRI 404: pelatihan dan pendidikan. Standar ini menunjukkan investasi organisasi dalam pengembangan tenaga kerja. Termasuk total jam pelatihan yang diberikan, distribusi pelatihan berdasarkan kategori karyawan seperti baru, manajemen atau operasional. Jumlah karyawan yang mengikuti program pelatihan dan pendidikan formal juga diungkapkan beserta dampaknya terhadap kinerja (Penerapan et al., 2022).

Standar GRI 405: keberagaman dan kesetaraan. Standar ini fokus pada keberagaman dan kesetaraan di lingkungan kerja. Didalamnya terdapat kebijakan yang diterapkan, distribusi karyawan berdasarkan jenis kelamin, usia, etnis, agama, disabilitas. Program untuk meningkatkan keberagaman dan cara memastikan proses rekrutmen serta promosi yang adil juga diungkapkan. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa organisasi menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama (Indra et al., 2025).

Standar GRI 406: non- diskriminasi. Standar ini membahas upaya organisasi dalam mencegah diskriminasi di semua aspek hubungan kerja. Termasuk kebijakan nondiskriminasi yang jelas, jenis diskriminasi yang dilarang seperti berdasarkan jenis kelamin, ras, atau usia. Pelatihan untuk karyawan dan manajemen tentang pentingnya nondiskriminasi juga termasuk disini, beserta upaya menciptakan budaya kerja yang inklusif (Lasmana et al., 2023).

Standar GRI 407: kebebasan berserikat. Standar ini mengungkapkan bagaimana organisasi menghormati hak tenaga kerja untuk berserikat dan melakukan perundingan kolektif. Didalamnya terdapat kebijakan terkait hal keberadaan serikat pekerja, dan persentase karyawan yang menjadi anggotanya. Dijelaskan juga untuk proses perundingan kolektif dan isi utama perjanjian kerja yang disepakati (Ekonomi et al., 2024).

Standar GRI 408: pekerja anak. Standar ini fokus pada upaya mencegah dan menghilangkan pekerjaan anak dioperasional dan rantai pasok. Termasuk kebijakan

yang melarang pekerjaan anak dan mematuhi peraturan tentang usia minimum kerja (Ekonomi et al., 2024).

Standar GRI 409: kerja paksa atau wajib kerja. Standar ini mengungkapkan upaya menghindari dan menghilangkan kerja paksa dalam semua bentuknya. Didalamnya terdapat peraturan yang melarang kerja paksa, proses memastikan tidak ada pekerja dalam kondisi seperti itu. Proses untuk memastikan bahwa tidak ada pekerja yang ditempatkan dalam kondisi kerja paksa atau wajib (Ekonomi et al., 2024).

Standar GRI 410: Praktik Keamanan. Standar ini mengungkapkan bagaimana organisasi mengelola keamanan untuk melindungi karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan aset. Termasuk kebijakan dan sistem keamanan yang diterapkan, jenis ancaman yang dihadapi seperti ancaman fisik atau keamanan siber (Indra et al., 2025).

Standar GRI 411: Hak Masyarakat Adat. Standar ini fokus pada dampak organisasi terhadap masyarakat adat dan bagaimana menghormati hak mereka. Didalamnya terdapat identifikasi masyarakat adat yang terdampak, proses konsultasi dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan (Standard, 2018).

Standar GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia. Standar ini fokus pada dampak langsung dan hak asasi manusia, melalui tindakan dan operasinya sendiri. Organisasi juga dapat berdampak pada hak asasi manusia secara tidak langsung, melalui interaksi dan hubungannya dengan pihak lain termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pemasok serta melalui investasinya. Organisasi bertanggung jawab atas dampak mereka pada keseluruhan tentang hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Standar GRI 413: Masyarakat Lokal. Standar ini fokus pada hubungan organisasi masyarakat lokal sekitar lokasi operasional. Termasuk identifikasi dampak positif dan negatif aktivitas organisasi terhadap masyarakat lokal, proses melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Program atau proyek yang dilakukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat lokal serta pembangunan infrastruktur, program pendidikan atau program kesehatan menjadi bagian penting dari pengungkapan ini (Rahmawati et al., 2024).

Standar GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok. Standar ini mengungkapkan bagaimana organisasi menilai dan mengelola dampak sosial pada rantai pasoknya. Isinya mencakup kebijakan dan kriteria yang digunakan untuk menilai pemasok dari aspek sosial. Persentase pemasok yang menjalani penilaian sosial juga dijelaskan. Jenis sosial yang menjadi fokus dalam penilaian seperti kondisi kerja, upah yang layak, atau hak tenaga kerja (Tambunan & Firmansyah, 2025).

Standar GRI 415: Kebijakan Publik. Standar ini berfokus pada posisi dan kontribusi organisasi terhadap kebijakan publik yang relevan dengan bisnisnya dan pembangunan berkelanjutan. Isinya mencakup posisi organisasi terhadap isu-isu publik yang penting seperti kebijakan lingkungan, kebijakan tenaga kerja, atau kebijakan perdagangan (Bastiar, 2024).

Standar GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan. Standar ini fokus pada organisasi untuk memastikan keamanan produk dan layanan serta melindungi kesehatan pelanggan. didalamnya terdapat kebijakan dan sistem manajemen untuk keamanan produk, proses pengujian dan verifikasi sebelum memasuki pasar (Athaya Artanti Hanafi, Candratika Widayati Lestari, 2025).

Standar GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan. Standar ini berfokus pada praktik pemasaran yang etis dan keakuratan informasi pada pelabelan produk atau layanan. Termasuk kebijakan dan standar etika yang diterapkan dalam aktivitas pemasaran, serta jenis kampanye pemasaran yang dilakukan dan apakah sesuai dengan prinsip etika (Latifatun Nisa, 2025).

Standar GRI 418: Privasi Pelanggan. Standar ini membahas tentang privasi pelanggan, termasuk hilangnya data pelanggan dan pelanggaran terhadap privasi pelanggan. Hal ini bisa berasal dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan dan standar sukarela yang sudah ada mengenai perlindungan privasi pelanggan. konsep ini mencakup dalam instrumen penting untuk organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi.

Standar GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi. Standar ini fokus pada kepatuhan sosial ekonomi, ini termasuk catatan kepatuhan organisasi secara keseluruhan, dan juga kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan spesifik dibidang sosial dan ekonomi. Kepatuhan dapat berkaitan dengan penipuan akuntansi dan pajak, korupsi, penyuapan, kompetisi, penyediaan produk dan jasa, atau masalah tenaga kerja, misalnya seperti diskriminasi ditempat kerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis penerapan *global reporting initiative* (GRI) 400 dalam *sustainability report* perusahaan sektor *Healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keberlanjutan atau laporan tahunan perusahaan melalui situs resmi www.idx.com dan perusahaan terkait. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan perusahaan berdasarkan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten (*content analysis*) dengan menilai setiap item pengungkapan GRI 4 melalui sistem pemberian skor untuk mengetahui tingkat penerapan standar GRI 4 yang selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan sektor <i>Healthcare</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	38
2	Perusahaan sektor <i>Healthcare</i> terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2024	23
3	Perusahaan menyediakan data yang lengkap <i>Sustainability Report</i> tahun 2024	23
Total Sampel yang Digunakan		23

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pengungkapan pada tahun 2024 perusahaan sektor *Healthcare* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan 2024

GRI 400	DVLA	KLBF	MERK	MIKA	PYFA	SCPI	TSPC	PRIM	PEHA	MDLA	CARE
401	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
402	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	1
404	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
405	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
406	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
413	0,5	0,5	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1
414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	0	0,5	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1
417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan analisis tabel diatas tingkat pengungkapan indikator sosial GRI-400 pada perusahaan sektor *Healthcare* menunjukkan variasi antara perusahaan. Perusahaan TSPC, PRIM, MDLA, dan CARE memiliki tingkat pengungkapan yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Hal ini tercermin dari dominasi skor 1= diungkapkan pada indikator dasar, khususnya GRI 401-405 yang mencakup aspek ketenagakerjaan, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, serta keberagaman dan kesetaraan kesempatan. Sementara itu untuk perusahaan DVLA, MERK, MIKA, PYFA, dan SCPI menunjukkan tingkat pengungkapan yang bersifat moderat. Perusahaan –perusahaan ini umumnya telah mengungkapkan indikator dasar GRI 400, namun pada beberapa indikator tertentu seperti GRI 402 dan GRI 413, pengungkapan masih bersifat parsial yang ditunjukkan dengan skor 0,5 = terpenuhi sebagian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengungkapan dilakukan secara terbatas, misalnya hanya berupa pernyataan kebijakan tanpa didukung data kuantitatif atau evaluasi kinerja yang memadai. Disisi lain, KLBF menunjukkan tingkat pengungkapan yang relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya, dengan dominan skor 0 = tidak diungkapkan pada sejumlah indikator. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi pengungkapan sosial sesuai standar GRI 400 belum dilakukan secara optimal.

Secara umum, indikator yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan sektor *Healthcare* adalah indikator yang berkaitan langsung dengan praktik ketenagakerjaan dan kesehatan serta keselamatan kerja.

Tabel 3. Pengungkapan Laporan Keberlanjutan 2024

Stan dar GRI 400	SOH O	BM HS	MT MH	MED S	BM HS	OM ED	PEV E	RSC H	IKP M	IRR A	DGN S
401	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
404	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
405	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
406	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
409	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
413	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan pada tabel berikut, sebagai dasar evaluasi kedalaman dan konsistensi transparansi tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial dan operasional kunci. Tidak ada perusahaan yang mencapai 100% pada seluruh indikator yang diamati. Hasil menunjukkan adanya variasi tingkat transparansi pengungkapan keberlanjutan pada dimensi sosial GRI 400 di antara 11 perusahaan yang di observasi pada tahun 2024. Secara kuantitatif, perusahaan DGNS mencatatkan performa pengungkapan tertinggi sebesar 47,36% dan disusul oleh MEDS 42,10%. Sebaliknya perusahaan seperti SOHO dan BMHS menunjukkan tingkat keterbukaan yang lebih rendah dengan hanya memenuhi sekitar 31,57% indikator. Mayoritas perusahaan menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi pada indikator fundamental ketenagakerjaan, khususnya pada GRI 401 hingga GRI 406, yang mencakup aspek kepegawaian, kesehatan dan keselamatan kerja K3, serta pelatihan karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan perusahaan masih terpusat pada aspek internal organisasi yang bersifat administratif dan regulatif. Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya transparansi, kedalaman pengungkapan keberlanjutan pada perusahaan-perusahaan tersebut, masih bersifat selektif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip materialitas secara komperhensif.

Tabel 4. Rekapitulasi Pengungkapan GRI 400 Sektor Healthcare 2024

Kategori	Jumlah	Persentase
Mengungkapkan (1)	63	30,14%

Tidak mengungkapkan (0)	138	66,03%
Pengungkapan sebagian	8	3,83%
Total	209	100,00%

Hasil rekapitulasi pengungkapan GRI 400 pada sektor *Healthcare* tahun 2024 mengungkapkan tingkat transparansi yang masih memperhatikan, data menunjukkan bahwa mayoritas indikator tidak diungkapkan oleh perusahaan, dengan persentase mencapai 66,03% = 138 poin dari total 209 pengamatan. Sementara itu, pemenuhan pengungkapan secara penuhnya tercatat sebesar 30,14% yang mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi mengenai dampak sosial belum menjadi fokus utama dalam praktik pelaporan korporat di sektor ini. Rendahnya pengungkapan sebagian 3,83% juga memperlihatkan kurangnya upaya perusahaan dalam menyajikan data transisi atau informasi yang bersifat komprehensif namun terbatas. Secara teoritis, dominasi ketidakterbukaan ini menunjukkan bahwa sektor *Healthcare* masih menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai mereka, yang berdampak pada rendahnya kualitas informasi bagi pemangku kepentingan.



Gambar 1. Diagram Rekapitulasi GRI 400

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis pengungkapan standar Global Reporting Initiative (GRI) 400 pada perusahaan sektor *Healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024, diperoleh gambaran bahwa tingkat transparansi aspek sosial masih tergolong rendah dan belum merata. Rekapitulasi pengungkapan menunjukkan bahwa sebagian besar indikator GRI 400 belum diungkapkan oleh perusahaan, dengan persentase ketidakpengungkapan mencapai 66,03% dari total indikator yang dianalisis. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaporan keberlanjutan pada sektor *Healthcare* masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam standar GRI.

Hasil pengamatan lebih lanjut menunjukkan bahwa perusahaan sektor *Healthcare* cenderung mengungkapkan indikator sosial yang berkaitan dengan aspek internal organisasi, terutama yang bersifat wajib secara regulatif. Indikator GRI 401 (Kepegawaian), GRI 403 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), GRI 404 (Pelatihan dan Pendidikan), serta GRI 405 (Keberagaman dan Kesetaraan) merupakan indikator

yang paling konsisten diungkapkan oleh sebagian besar perusahaan sampel. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama perusahaan masih berada pada pengelolaan sumber daya manusia dan pemenuhan kewajiban ketenagakerjaan, dibandingkan dengan pengungkapan dampak sosial yang lebih luas.

Meskipun indikator-indikator tersebut relatif sering diungkapkan, kualitas dan kedalaman informasinya masih terbatas. Beberapa perusahaan hanya menyajikan deskripsi kebijakan atau program secara umum tanpa disertai data kuantitatif yang rinci maupun evaluasi capaian kinerja. Kondisi ini tercermin dari adanya pengungkapan parsial (skor 0,5) pada indikator tertentu, khususnya GRI 402 (Hubungan Tenaga Kerja dan Manajemen) dan GRI 413 (Masyarakat Lokal). Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan serta masyarakat lokal belum sepenuhnya terintegrasikan dalam praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Sebaliknya, indikator-indikator yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan berserikat, praktik ketenagakerjaan yang adil, penilaian sosial pemasok, dan kepatuhan sosial ekonomi (GRI 407 hingga GRI 419) sebagian besar tidak diungkapkan oleh perusahaan. Rendahnya pengungkapan pada indikator-indikator tersebut mencerminkan bahwa aspek sosial eksternal belum dipandang sebagai isu material yang perlu dilaporkan secara transparan, meskipun sektor Healthcare memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Perbedaan tingkat pengungkapan antarperusahaan juga memperlihatkan adanya variasi komitmen terhadap praktik keberlanjutan. Beberapa perusahaan menunjukkan tingkat pengungkapan yang relatif lebih tinggi, sementara perusahaan lainnya masih sangat terbatas dalam menyajikan informasi sosial. Ketimpangan ini mengindikasikan belum adanya keseragaman penerapan standar GRI 400 di sektor Healthcare, serta perbedaan kesiapan dan kesadaran manajemen dalam mengelola dan melaporkan kinerja sosial perusahaan.

Dari perspektif teoretis, hasil penelitian ini sejalan dengan legitimacy theory, yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung mengungkapkan informasi yang dianggap aman dan dapat menjaga legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, indikator yang bersifat normatif dan mudah dipenuhi, seperti ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, lebih banyak diungkapkan, sementara isu-isu yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi, seperti hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial eksternal, cenderung dihindari. Kondisi ini menyebabkan laporan keberlanjutan yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keberlanjutan yang holistik sebagaimana ditekankan dalam standar GRI.

Dalam konteks sektor Healthcare, temuan ini menjadi perhatian penting mengingat tingginya risiko sosial dan lingkungan yang melekat pada kegiatan operasional perusahaan, termasuk pengelolaan limbah medis dan perlindungan keselamatan pasien serta masyarakat. Rendahnya tingkat pengungkapan aspek sosial eksternal berpotensi menciptakan kesenjangan informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, sehingga melemahkan peran laporan keberlanjutan sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun perusahaan sektor Healthcare telah mulai menerapkan standar GRI 400, implementasinya masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Diperlukan

peningkatan komitmen manajemen untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pengungkapan aspek sosial agar laporan keberlanjutan dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan.

PENUTUP

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pengungkapan standar global reporting initiative (GRI) 400 dalam laporan keberlanjutan perusahaan sektor *Healthcare* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan aspek sosial berdasarkan standar GRI 400 masih berada pada tingkat yang belum memadai dan belum mencerminkan penerapan yang menyeluruh. Seperti hasil rekapitulasi indikator menunjukkan bahwa sebagian besar item GRI 400 belum diungkapkan oleh perusahaan, dengan proporsi pengungkapan yang tidak diungkapkan mencapai 66,03%. Sementara itu, indikator yang diungkapkan secara penuh hanya sebesar 30,14% dan pengungkapan sebagian sebesar 3,83%. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik *sustainability report* pada perusahaan sektor *Healthcare* masih cenderung terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan keterbukaan informasi sosial yang diharapkan. Secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun standar GRI 400 telah mulai diterapkan oleh perusahaan sektor *Healthcare*, implementasinya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal kedalam strategi keberlanjutan perusahaan.

REFERENSI

- Apriliyani, I. K. A. B., Farwitawati, R., & Nababan, R. I. A. A. (2019). *Analisis Penerapan Global Reporting Initiative (GRI) G4 pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Sektor Pertanian*. 0761.
- Athaya Artanti Hanafi, Candratika Widayati Lestari, E. M. S. (2025). *ANALISIS PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORTS*. 5(1), 326–343.
- Ayu, I. D., Pertiwi, E., Yudha, P., Putri, A., Ayu, I. G., & Permata, R. (2024). *Analisis Sustainability Reporting Sebelum dan Sesudah Penerapan Standar Global Reporting Initiative (GRI) 2021*. 4(1), 2588–2609.
- Bastiar, Y. (2024). *Pengungkapan Standar GRI Terhadap Kinerja Sosial dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan di Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Bandung)*. 2(3).
- Ekonomi, I. J., Manajemen, A., Juli, N., Pratama, J. H., Ekonomi, F., Padjadjaran, U., Ekonomi, F., & Padjadjaran, U. (2024). *Pengungkapan Kinerja Sosial pada Aspek Sosial Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung) Syaiful Rahman Soenaria Organisasi internasional independen Global Reporting Initiative (GRI) membuat standar pelaporan keberlanjutan (Sustainability Report)*.
- Imani, E. S., Bagus, I., & Bayangkara, K. (2023). *Analisis Pelaporan Kinerja Lingkungan Pada Rumah Sakit Lavalette Tahun 2022*. 4(2). <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i2.1116>

- Indra, A., Pramitha, A., & Bandiyono, A. (2025). *Dari Komitmen ke Transparansi: Mengungkap Pelaporan Keberlanjutan Standar GRI Topik pada Perusahaan E-Commerce di Indonesia*. 4(4), 6865–6881.
- Lasmana, L. I., Breliastiti, R., & Setiawan, T. (2023). *Penerapan GRI Standards dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2021 pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Leonardo*. 7(2), 57–83. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i2.6023>
- Latifatun Nisa, A. B. (2025). *ANALISIS PENGUNGKAPAN ASPEK SOSIAL BERDASARKAN STANDAR GRI 400 PADA PERUSAHAAN E-COMMERCE DAN FINTECH*. 24(1), 226–237. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v24i1.473>
- Limarwati, D., Alfiyani, Y. S. R., & Firmansyah, A. (2024). *Laporan Keberlanjutan: Manfaat Dan Perkembangan Standar*. *Jurnalku*, 4(1), 101–112. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.635>
- Muhammad, H. (2022). 1, 2, 3. 16(2), 238–249.
- Mysaka, H., & Derun, I. (2022). *GENERAL MANAGEMENT GRI 400 as a Contemporary tool to Increase trust in Corporate Social Responsibility*. 23(187), 256–270. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.187.32>
- Penerapan, A., Standar, G. R. I., Rata-, B., Pelatihan, R., Rasio, D. A. N., Biaya, P., & Rae, M. (2022). *TOTAL BIAYA OPERASIONAL LAINNYA PADA BANK BUMN menyediakan jasa keuangan, operasional*. 6(1), 14–38.
- Rakhmawati, A., Rahmasari, O. F., & Banjarmasin, P. N. (2024). *The Disclosure of Sustainability Report in Energy and Financial Sector Companies of Indonesia and Malaysia Sharia Securities List*. 4(1), 1–16.
- Standard, T. (2018). *GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 2016*. July, 1–14.
- Tambunan, F. H., & Firmansyah, A. (2025). *PENILAIAN KUALITAS LAPORAN KEBERLANJUTAN PT BISI INTERNATIONAL, TBK. BERDASARKAN STANDAR*. 5(2), 148–160.